



**Dadang Solihin**  
**Rektor Universitas Darma Persada**



# **Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan**



**Dialog Rektor dengan DPRD Kota Lubuklinggau**  
**Mercure Hotel-Jakarta, 22 Februari 2018**



# Penyebab Kemiskinan

## Kemiskinan Natural

- Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang miskin.
- Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya,
- sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan imbalan pendapatan yang amat rendah.





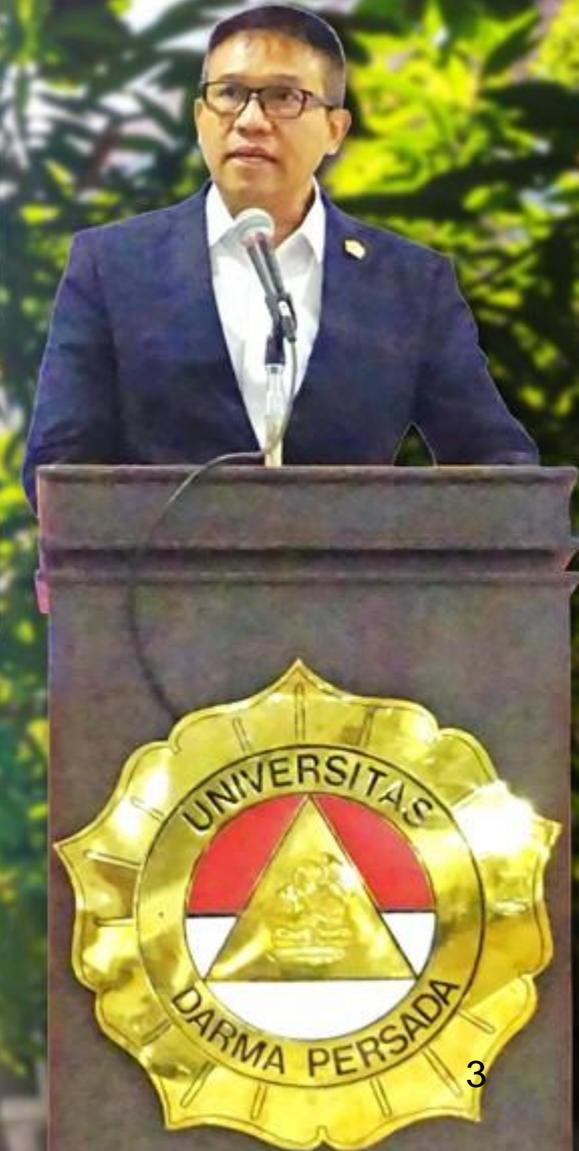
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email [dadangsol@gmail.com](mailto:dadangsol@gmail.com), HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



# Materi

- Kemiskinan di Indonesia
- Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional
- Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
- Urgensi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan

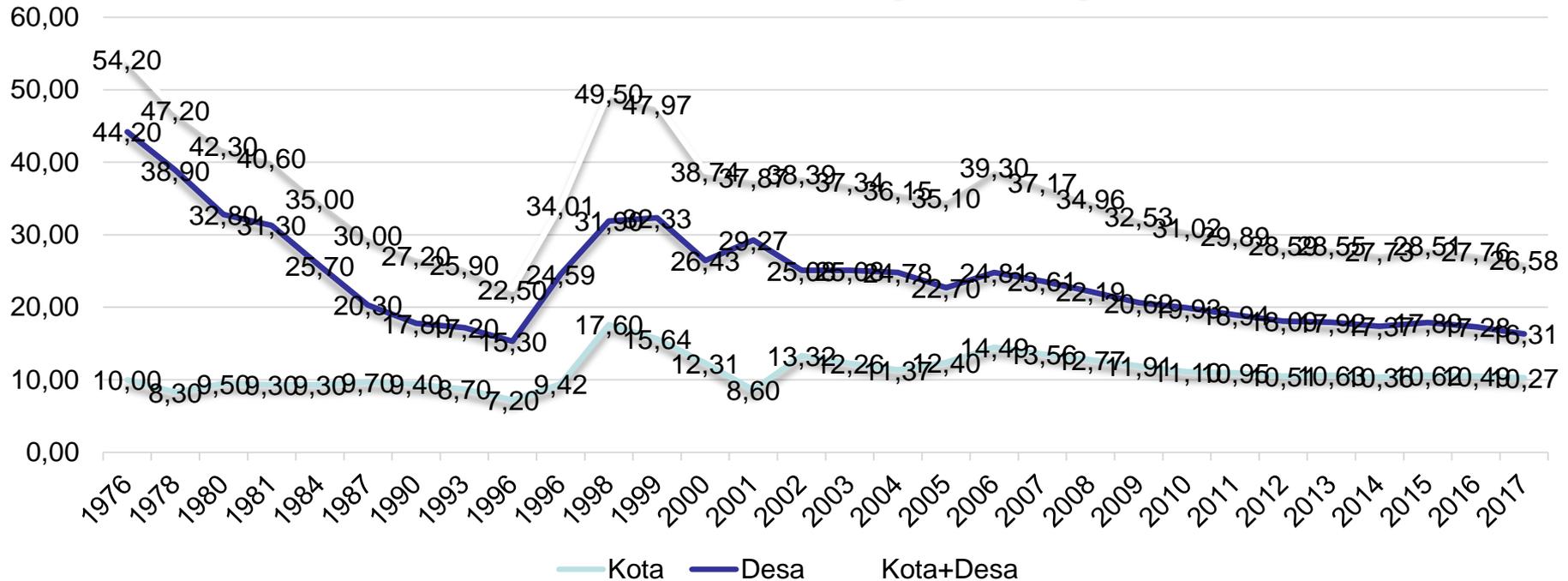




# Kemiskinan di Indonesia

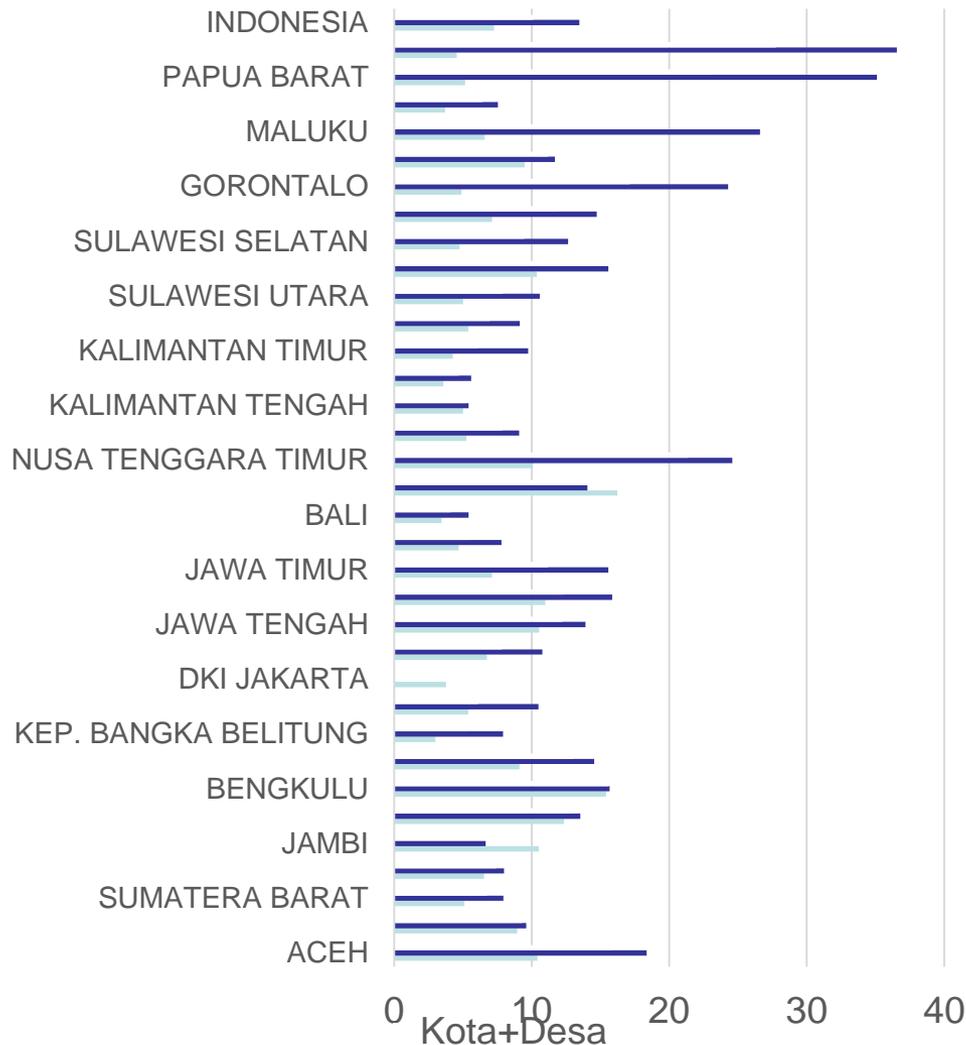


# Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1970-2017 (Juta)



- Penurunan jumlah penduduk miskin per tahun mengalami perlambatan dibandingkan masa sebelum krisis,
- Terdapat lebih banyak penduduk miskin di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan.

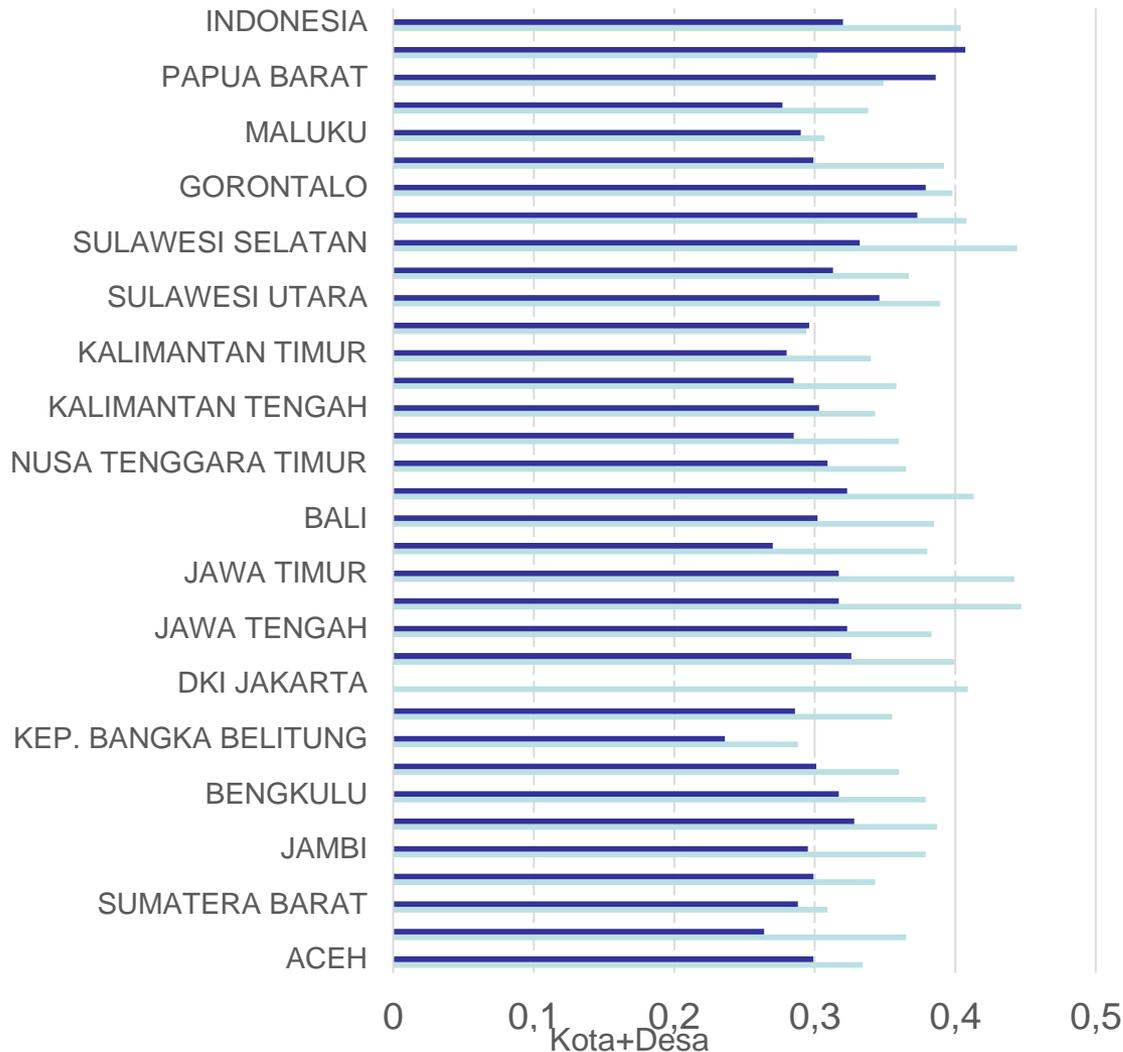
# Persentase Kemiskinan Provinsi 2017



Persentase kemiskinan di Wilayah Indonesia Timur lebih tinggi daripada persentase kemiskinan di Wilayah Indonesia barat.

Persentase kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan di seluruh provinsi

# Gini Rasio Provinsi 2017



Wilayah pedesaan yang penduduknya relatif memiliki kesejahteraan yang sama akan cenderung lebih mudah diajak bergotong royong atas dasar kesamaan nasib,

Namun demikian, data rasio gini menunjukkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan.

# Sasaran Pembangunan Nasional

Target Pembangunan	2016	2017	2018
Tingkat Kemiskinan	10,7	10,4	9,5-10,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,4	5,0-5,3
Gini Rasio	0,397	0,39	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,18	70,79	71,5



# Program Penanggulangan Kemiskinan

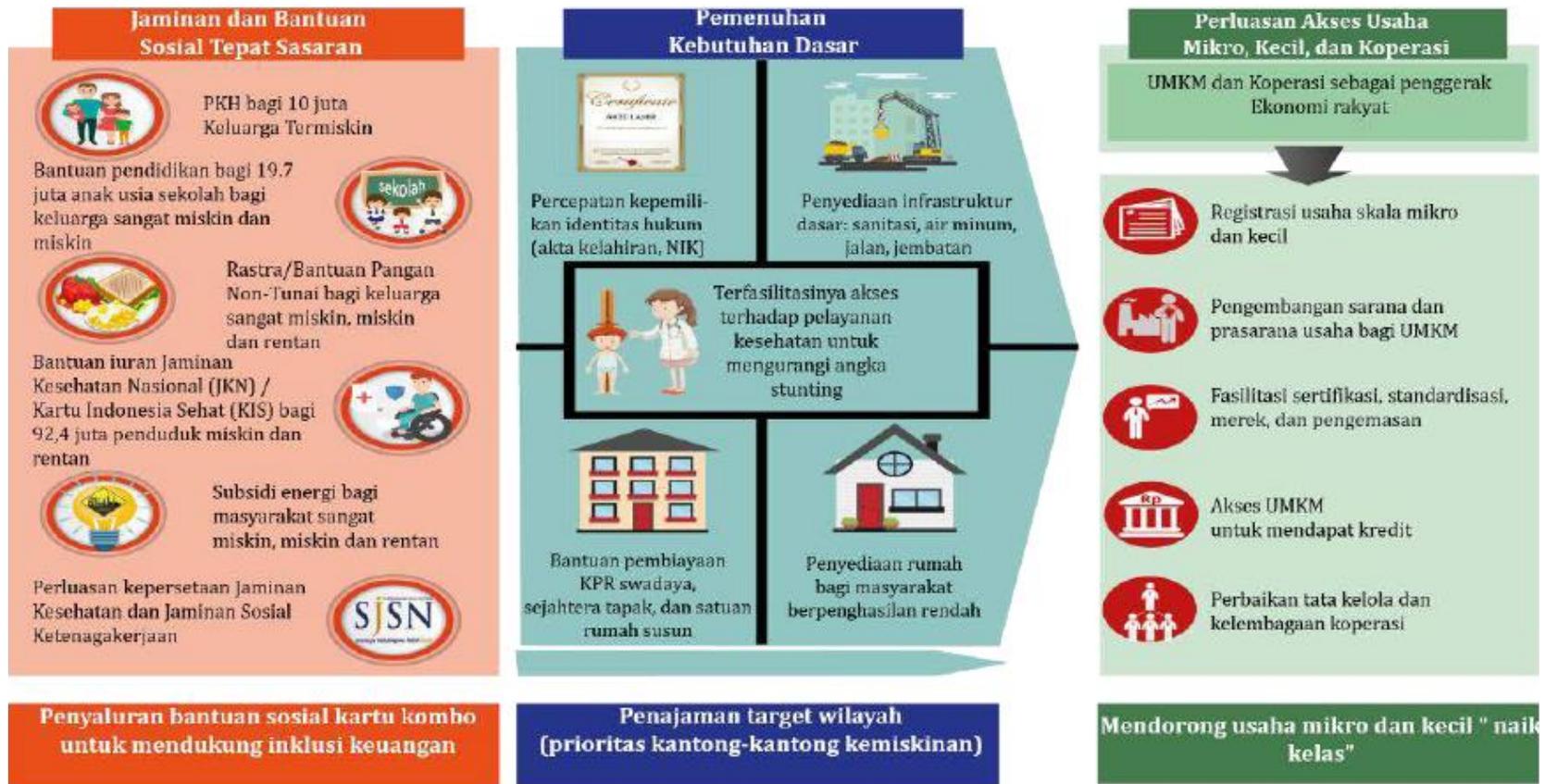
# Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Program	Dana (Triliun Rupiah)		Sasaran
Subsidi	145,5	117.700	Kepala Keluarga
Dana Desa	60,0	74.958	Desa
JKN	25,5	92.400.000	Jiwa
Bantuan Pangan	20,8	15.600.000	Keluarga Penerima Manfaat
PKH	17,1	10.000.000	Keluarga Penerima Manfaat
Indonesia Pintar	10,8	19.600.000	Siswa
Bidik Misi	4,1	401.700	Mahasiswa
Total	283,8		

Presiden mengarahkan agar APBN 2018 fokus pada Penanggulangan Kemiskinan

Namun demikian, peran daerah diperlukan untuk mengisi gap yang ditinggalkan pemerintah pusat agar penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat

# Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional



- Program penanggulangan kemiskinan yang ada masih didominasi oleh program konsumsi
- Penanggulangan kemiskinan pada sisi produksi perlu didorong dengan memberikan motivasi insentif yang lebih besar ketika berhasil naik kelas daripada bantuan yang diberikan

# Perbandingan Data Kemiskinan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumssel, dan Nasional

	Kota Lubuk Linggau			Sumatera Selatan			Indonesia		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Jumlah (ribu orang)	33.21	31.05	29.54						
persentase	15.16	13.99	13.12	14.25	13.54	13.19	11.13	10.7	10.12
Keparahan	0.57	0.55	0.56	0.64	0.42	0.6	0.51	0.44	0.46
kedalaman	2.4	2.19	2.14	2.46	2.01	2.24	1.84	1.74	1.79

- Tingkat kemiskinan di daerah lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional menunjukkan bahwa program nasional saja tidak cukup untuk menanggulangi kemiskinan di seluruh Indonesia
- Daerah dapat berperan mengisi gap penanggulangan kemiskinan nasional melalui meningkatkan skala dan kecepatan penanggulangan kemiskinan



# Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan



# Permasalahan Kemiskinan di Indonesia



## Tiga karakteristik kemiskinan yang menonjol saat ini

1. Jumlah Penduduk miskin masih cukup besar
2. Ketimpangan kemiskinan antar wilayah
3. Akses & kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih jauh tertinggal.

# Penyebab Kemiskinan

## Kemiskinan Natural

- Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang miskin.
- Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya,
- sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan atau walaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan imbalan pendapatan yang amat rendah.

# Penyebab Kemiskinan

## Kemiskinan Struktural

- Kemiskinan struktural adalah kemiskinan (baik kemiskinan absolut maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan struktur masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan masih tertinggal.
- Kemiskinan struktural ini dikenal juga dengan kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang.

# Penyebab Kemiskinan

## Kemiskinan Kultural

- Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya, mereka sudah merasa kekurangan.
- Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, menolak mengikuti perkembangan, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai.

# Hak Masyarakat Miskin

Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan

Memperoleh pelayanan kesehatan;

Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

Mendapatkan perlindungan sosial memperoleh derajat kehidupan yang layak;

Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan

Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

# Determinan Kemiskinan di Daerah

- Transfer dari pusat mendominasi sumber pendapatan daerah
- Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri
  - Bukti berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problematis yang sering kali tumpang tindih dengan regulasi nasional
  - Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah
- Kapasitas Teknis
  - Sekitar dua pertiga desa di Indonesia, khususnya di kawasan timur, masih tidak memiliki akses ke jaringan telekomunikasi
  - Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan
- Aspek Tata Kelola Desentralisasi
  - Pengaturan kewenangan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah
  - Sehausnya desentralisasi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi

## Sumber:

Nazara (2014) Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

[dadang-solihin.blogspot.co.id](http://dadang-solihin.blogspot.co.id)

# Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan



bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat

# Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

## Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga

- bantuan pangan dan sandang;
- bantuan kesehatan;
- bantuan pendidikan; dan
- bantuan perumahan.

## Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

- pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
- fasilitasi kemitraan Pemerintah dan Swasta

## Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;

- peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
- perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
- peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
- peningkatan sarana dan prasarana usaha.

## Program-program lainnya

- program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
- program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Penanggulangan kemiskinan di level daerah perlu difokuskan untuk **mengisi gap** yang belum ditangani oleh pemerintah pusat seperti peningkatan akurasi sasaran, merangkul stakeholder yang lebih luas, peningkatan keberlanjutan program, dan perluasan skala program

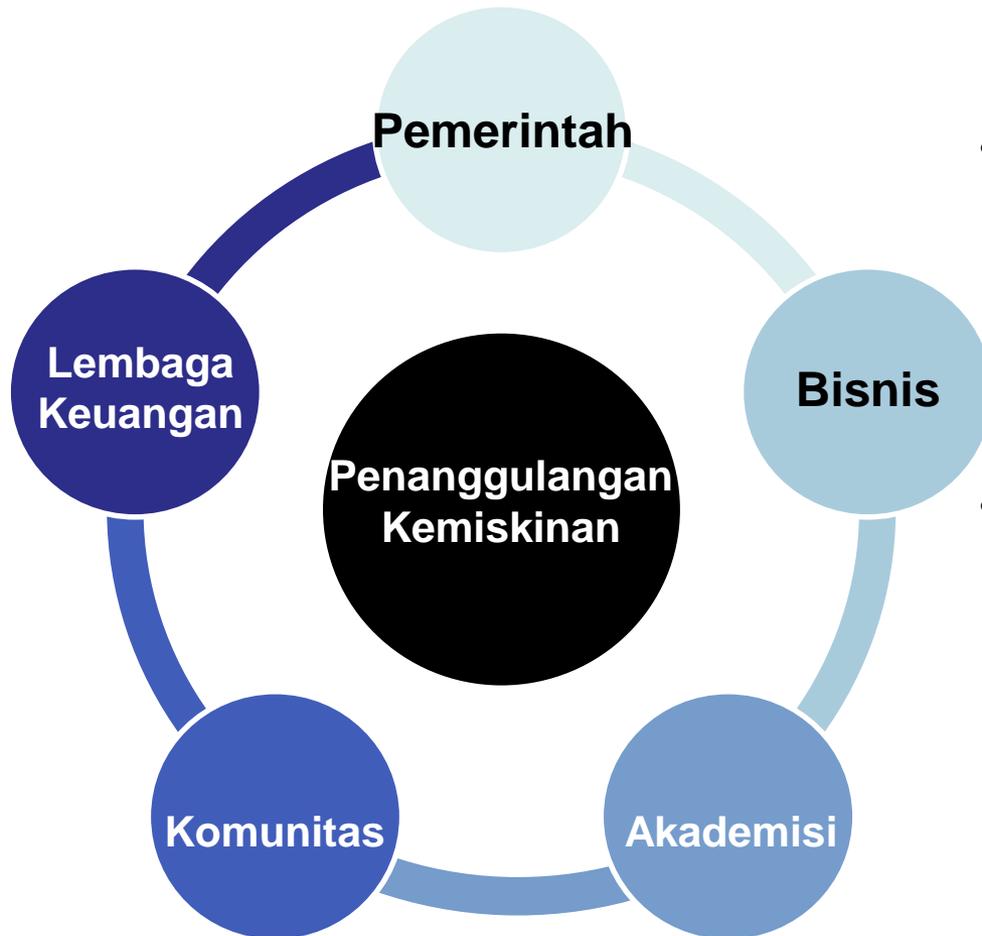
# Penajaman Sasaran Program



- Posisi pemerintah pusat yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat menyebabkan risiko kesalahan sasaran program karena data yang kurang akurat,
- Pemerintah daerah dapat mengisi gap ini dengan mendukung data yang lebih akurat.

# Urgensi Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan

# Merangkul Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas



- Lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat di daerah dapat dilibatkan melalui **Peraturan Daerah**,
- Tujuannya adalah meningkatkan skala implementasi program sesuai kemampuan dan fokus masing masing pihak.

# Meningkatkan Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Miskin

**“Hanya si miskin yang mampu melepaskan dirinya dari kemiskinan”**

- Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan UMKM perlu memaksimalkan keterlibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan program dengan mengajak mereka untuk berkontribusi
- Kontribusi mencakup kehadiran rapat; penyampaian pendapat; kontribusi dana, tenaga, pikiran, maupun material; dan menikmati hasil program
- Partisipasi akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat miskin atas hasil dari program. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk berusaha lebih keras untuk terlepas dari kemiskinan
- Seluruh bentuk partisipasi menjadi komponen pemantauan dan evaluasi yang nantinya menjadi dasar pemberian insentif.

# Pemberian Insentif untuk Meningkatkan Motivasi dalam Pelaksanaan Program

1. Insentif ditujukan untuk meningkatkan motivasi seluruh pihak dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan,,
2. Insentif akan memberikan *demonstration effect* kepada mereka yang tidak melaksanakan program dengan baik agar terpacu untuk memperbaiki performa pada periode berikutnya,
3. Insentif hanya diberikan kepada mereka yang memiliki performa yang baik dengan hasil yang optimal (melebihi target yang telah ditentukan),
4. Pemantauan dan Evaluasi menjadi dasar pemberian insentif,
5. .....

# Pemberian Insentif untuk Meningkatkan Motivasi dalam Pelaksanaan Program

5. Insentif yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan,
  - **Lembaga Pemerintah** → insentif seperti promosi jabatan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara
  - **Dunia Usaha** → insentif yang mampu mendukung operasional bisnis
  - **Akademisi** → insentif pendukung kegiatan akademis
  - **Lembaga Masyarakat** → insentif berupa keterlibatan pada program lain di periode mendatang
  - **Lembaga Keuangan** → insentif untuk dilibatkan dalam program lain dan juga dukungan operasional
  - **Masyarakat Sasaran** → insentif berupa bantuan tambahan jika mampu melaksanakan program dengan baik
  - **Desa** → tambahan dukungan dana desa untuk desa dengan performa dan tingkat partisipasi melebihi target

# Terima Kasih

